

**UPAYA PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PARIWISATA  
PACU JALUR DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
TAHUN 2018**

**Oleh: Oktorlanwa**

Email: oktorlanwa@yahoo.com

**Pembimbing: Drs. H. Isril, MH**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*This study answers to answer the main problem about the reception of the Original Regional Receipts (PAD) of Kuantan Singingi Regency (Kuansing) from the Pacu Path tourism sector in Fiscal Year 2018. Then, find out what factors influence the acceptance of the region's original income (PAD) from the sector Runway tourism, but accepts the PAD obtained by the Kuantan Singingi District Government each year fixing the deficit and reaching the target set. The theory used in this study is published in Policy Analysis with Research Locations in Batang Narosa Subdistrict as the center of activities and even Pacu Path Tourism in Kuantan Bay, Kuantan Singingi Regency.*

*The research method uses qualitative, this research is the primary data source, namely the Head of the Tourism, Youth and Sports Services Division of the Kuantan Singingi Regency, the Head of the Kuantan Singingi Regional Revenue Agency, the Kuantan Tengah District Head, the Chair / management of NGOs related to tourism, tourism aid providers and community leaders. local. Data were collected by in-depth interview techniques, observation and documentation, then the data were analyzed descriptively qualitatively. Regional Research Income of PAD Kuantan Singingi Regency's Revenue in the 2014-2018 Fiscal Year, which was obtained from the tax and retribution and licensing sectors, was also proven to have not reached the target set. Likewise with the approval of the annual Event Runway Tour Event for PAD reception in the field of tourism. Regulatory Efforts undertaken by the Regional Government include, among others, regulating Regional Regulations on Taxes and Levies as well as Business Administration, APBD fund allocation. But the acceptance of PAD was still not approved. The contributing factors are regional potential, tourist attraction and unproductive tourist attraction, limited funds and competence of regional staff to outsiders in the development of regional tourism.*

*Keywords: Government Efforts, PAD and Pathways.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan sektor pariwisata adalah salah satu sektor penerimaan pendapatan dalam meningkatkan ekonomi terbesar bagi banyak negara di dunia dan sektor terkuat untuk pembangunan ekonomi global. Berikut beberapa hal yang menjadi nilai mengapa sektor pariwisata sangat vital dalam membangun suatu ekonomi Negara:

1. Pariwisata memperkerjakan 204 juta orang di seluruh dunia atau satu dari setiap sembilan pekerja, 10,5% dari angkatan kerja global.
2. Pariwisata adalah penyumbang ekonomi terkemuka di dunia, menghasilkan 10,2% produk nasional bruto dunia.
3. Pariwisata adalah produsen terkemuka untuk pendapatan pajak sebesar \$ 655 milyar.
4. Pariwisata adalah industri terbesar di dunia dalam hal keluaran bruto mendekati \$ 3,4 trilyun.-
5. Pariwisata merupakan 10,9% dari semua belanja konsumen, 10,7% dari semua investasi modal dan 6,9% dari semua belanja pemerintah.

Otonomi Daerah merupakan wewenang bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, khususnya masalah keuangan yang sangat penting sebagai sumber modal pembangunan dan kehidupan masyarakat di daerah. Bahkan yang menjadi salah satu dasar utama dalam mempertimbangkan dibentuknya suatu wilayah negara menjadi daerah otonom, karena otonomi tanpa ditunjang kemampuan keuangan daerah berakibat kepada lemahnya instrumen di daerah untuk menggerakkan

roda pembangunan di daerah. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian juga semakin baik pengelolaannya semakin banyak pemakaian uang tersebut. (Halim dan Mudjid, 2009).

Sebagai wujud dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangannya sendiri dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 memposisikan pemda untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota kearah peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dalam mengelola PAD yang bersumber dari sektor pembangunan pariwisata, khususnya daya tarik wisata Pacu Jalur yang telah menjadi even wisata internasional. Namun dalam kenyataannya, banyak pihak terutama kalangan anggota DPRD menyatakan bahwa even Pacu Jalur yang selama ini menjadi andalan pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi dianggap hanya menghabiskan dana APBD Kuansing setiap tahunnya, dan tidak menghasilkan keuntungan berupa peningkatan penerimaan PAD bagi devisa daerah, tapi malah setiap tahunnya menyusut pada APBD Kabupaten Kuansing. (Datariau.com, Selasa, 17/1/2017).

Turun-naiknya penerimaan PAD dari sektor pariwisata di Kabupaten Kuansing dapat dilihat pada data dibawah ini sebagai berikut :

**Tabel 1.1. Penerimaan PAD Dari Sektor Pariwisata di Kabupaten Kuansing (2014-2018)**

| No | Tahun | Jenis Pendapatan                                                  | Jumlah PAD (Rp)                               | Target (Rp) | Realisasi      |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|
| 1  | 2014  | - Retribusi Objek Wisata<br>- Pemakaian Kekayaan Daerah<br>Jumlah | 77.300.000,-<br>18.000.000,-<br>85.300.000,-  | 100 Jt      | Tidak Tercapai |
| 2  | 2015  | - Retribusi Objek Wisata<br>- Pemakaian Kekayaan Daerah<br>Jumlah | 78.200.000,-<br>10.800.000,-<br>89.000.000,-  | 100 Jt      | Tidak Tercapai |
| 3  | 2016  | - Retribusi Objek Wisata<br>- Pemakaian Kekayaan Daerah<br>Jumlah | 53.200.000,-<br>10.411.650,-<br>63.611.650,-  | 100 Jt      | Tidak Tercapai |
| 4  | 2017  | - Retribusi Objek Wisata<br>- Pemakaian Kekayaan Daerah<br>Jumlah | 64.092.000,-<br>5.400.000,-<br>69.492.000,-   | 100 Jt      | Tidak Tercapai |
| 5  | 2018  | - Retribusi Objek Wisata<br>- Pemakaian Kekayaan Daerah<br>Jumlah | 69.900.000,-<br>33.674.000,-<br>103.574.000,- | 100 Jt      | Tercapai       |

Sumber : *Disbudparpora Kabupaten Kuansing, 2018.*

Data tabel Tabel 1.1. Penerimaan Pad Dari Sektor Pariwisata di Kabupaten Kuansing (2014-2018) menjelaskan bahwa periode 4 tahun sejak 2014-2018 penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata di Kabupaten Kuansing berdasarkan jenis penerimaan yaitu retribusi objek wisata dan pemakaian kekayaan daerah, ternyata jumlahnya relatif kecil dan fluktuatif lebih banyak tidak tercapai tanpa

ada perubahan besar yang sangat signifikan. Khusus untuk anggaran dana yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Kuansing untuk perhelatan akbar Pacu Jalur sejak Tahun 2014-2018 terus semakin meningkat, sedangkan penerimaan daerah yang diperoleh dari even Pacu Jalur ternyata tidak berimbang. Secara rinci lihat data table berikut

**Tabel 1.2. Alokasi Anggaran Dana Even Pacu Jalur Pemerintah Kabupaten Kuansing (2016-2018)**

| No | Sumber Anggaran Dana | 2016            | 2017            | 2018            |
|----|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Hibah Provinsi       | -               | -               | -               |
| 2  | APBD Kab             | 366.000.000,-   | 800.000.000,-   | 800.000.000,-   |
| 3  | Sumbangan Perusahaan | 800.000.000,-   | 600.000.000,-   | 700.000.000,-   |
| 4  | Sewa Lapak Pedagang  | 75.000.000,-    | 40.000.000,-    | 40.000.000,-    |
| 5  | Bakom PKB Kuansing   | 300.000.000,-   | 300.000.000,-   | 300.000.000,-   |
| 6  | Kontraktor           | 100.000,-       | 100.000,-       | 100.000.000,-   |
|    | Jumlah               | 1.600.000.000,- | 1.900.000.000,- | 2.000.000.000,- |

Sumber : *Disbudparpora Kabupaten Kuansing, 2018*

Data Tabel 1.2. tentang Alokasi Anggaran Dana Even Pacu Jalur Pemerintah Kabupaten Kuansing (2016-2018) diatas menunjukkan bahwa even pariwisata Pacu Jalur setiap tahunnya mengalami peningkatan dana yang dialokasikan dalam menyukseskan tradisi lokal yang menglobal tersebut, namun sebaliknya jumlah dana yang diterima Pemerintah Kabupaten Kuansing sebagai devisa daerah semakin menurun. Realisasi penerimaan keuangan Kabupaten Kuantan Singingi hingga Desember 2016 berjumlah Rp 1.226,97 Milyar. Menurun dari penerimaan pada akhir tahun 2015 (Rp 1.243,42 Milyar). Realisasi pengeluaran keuangan Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2016 sebesar 1.288,05 Milyar rupiah, menurun dari tahun 2014. (Sekda Kabupaten Kuansing, 2018).

Selain sumber penerimaan daerah dari retribusi objek wisata, maka salah satu potensi yang paling dominan dalam menopang Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi yaitu di sektor pajak. Namun penerimaan dari sektor pajak ini juga hingga sekarang dinilai belum tercapai secara maksimal. Bupati Kuansing secara terbuka mengakui dan menyampaikan kepada anggota DPRD Kabupaten Kuansing bahwa target PAD sering kurang tercapai. Untuk itu, pemerintah segenap jajarannya terus berupaya mencari strategi yang dapat meningkatkan PAD Kabupaten Kuansing pada masa datang.

Berdasarkan gejala tersebut jelas terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Kuansing selama ini hanya mampu mengambil suatu kebijakan dan pengaturan dalam pembangunan bidang kepariwisataan melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) untuk tetap melaksanakan even akbar daya tarik wisata Pacu Jalur setiap tahunnya pada peringatan Hari Kemerdekaan RI dengan berbagai persiapan, pendanaan dan ajang

perlombaan sampai ke tingkat internasional. Akan tetapi, kebijakan dan aturan yang ditetapkan seperti Peraturan Daerah tentang Restribusi Objek Wisata, Perizinan, Pajak, dan sebagainya jika tidak diikuti dengan langkah-langkah atau strategi yang tepat-guna untuk mendongkrak penerimaan PAD dari even Pacu Jalur, maka akan sulit diharapkan target PAD dari sektor pariwisata ini dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan penelitian lebih jauh tentang penerimaan PAD dari sektor pariwisata Pacu

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Kebijakan Pariwisata Nasional dan Daerah**

Perkembangan pariwisata dewasa ini sangat pesat dan memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional. Untuk itu, pembangunan pariwisata terus mendapat perhatian dan pemerintah yang mempunyai keyakinan bahwa pariwisata dapat menjadi sektor andalan untuk menggantikan minyak dan gas bumi yang selama ini menjadi andalan dalam menunjang penerimaan negara. Dunia pariwisata telah mengalami berbagai perubahan baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, serta dorongan orang untuk melakukan perjalanan, cara berpikir, maupun sifat perkembangan itu sendiri.

Pariwisata merupakan industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor lain di dalam negara penerima wisatawan. Di samping itu, pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks meliputi industri-industri seperti industri kerajinan tangan, industri cinderamata, penginapan dan transportasi. Sebagai industri jasa yang digolongkan sebagai industri ketiga,

pariwisata cukup berperan penting dalam menetapkan kebijaksanaan mengenai kesempatan kerja, dengan alasan semakin mendesaknya tuntutan akan kesempatan kerja yang tetap sehubungan dengan selalu meningkatnya wisata di masa yang akan datang.

Pada pasal 7, Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, ada 4 hal yang menjadi acuan dalam Pembangunan kepariwisataan meliputi: a. industri pariwisata; b. destinasi pariwisata; c. pemasaran c. pemasaran; dan d. kelembagaan kepariwisataan. Pada era globalisasi saat ini, pemerintah dituntut untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang terdapat pada suatu daerah. Dari pengembangan tersebut dapat diambil dari beberapa urusan pemerintah, salah satunya adalah urusan pariwisata. Sektor pariwisata dapat dikembangkan menjadi salah satu faktor pendorong utama perekonomian di suatu daerah dan dapat menjadi salah satu industri yang mengglobal pada abad ke-21 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada suatu daerah. Terbukti nyata bahwa peranan pariwisata telah memberikan devisa yang cukup besar diberbagai negara dalam menyumbang devisa bagi pembangunan.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan yuridis bagi pengembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Dalam penyelenggaraan dan mengatur pembangunan dan pemerintahan, secara jelas mengisyaratkan kepada pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam melaksanakan dan sekaligus mensukseskan program yang telah direncanakan dan dicanangkan dalam memajukan dan membangun daerahnya sendiri dengan memanfaatkan potensi yang tersedia.(J. Kaloh, 2002).

Tujuan program pengembangan pariwisata adalah mengembangkan dan

memperluas diversifikasi produk dan kualitas pariwisata nasional yang berbasis kepada pemberdayaan masyarakat, kesenian dan kebudayaan serta sumber daya (pesona) alam lokal dengan mempertahankan kelestarian seni dan budaya tradisional serta kelestarian lingkungan hidup setempat, daan mengembangkan serta memperluas pasar pariwisata terutama pasar luar negeri (internasional).Terkait dengan hal tersebut, maka iharapkan seluruh pihak berpartisipasi dan dapat mengajak berbagai kekuatan masyarakat untuk berkarya dan mempunyai minat disektor kebudayaan dan pariwisata guna bersama-sama membangun ketahanan kebudayaan nasional dan mendukung ekonomi yang berkerakyatan dalam upaya membangun kebudayaan dan pariwisata Indonesia.

Pembangunan dan pengembangan pariwisata melibatkan banyak sektor, sehingga dapat dikatakan bahwa pariwisata merupakan bidang yang multi sektoral.Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan usaha pariwisata yang cukup beragam, baik kebutuhan langsung maupun yang tidak langsung, melibatkan hampir semua sektor pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan dan pengembangan pariwisata banyak tergantung dari dukungan berbagai sektor.Untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan pariwisata diperlukan program pendukung lintas sektoral yang merupakan program yang diharapkan dilakukan oleh berbagai instansi/lembaga lain yang akan ikut menentukan keberhasilan pembangunan kebudayaan dan pariwisata dengan mengidentifikasi berbagai kegiatan lintas sektoral, diharapkan pihak terkait dapat membantu dan mendukung sasaran pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata, baik ditingkat nasional maupun ditingkat regional. Salah satu tugas penting yang akan diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah adalah

perencanaan dalam pengembangan pariwisata akan menuntut peran aktif dan pro-aktif pemerintah daerah untuk mengembangkan berbagai peluang pariwisata diberahny dan secara profesional untuk merancang strategi-strategi pengembangan pariwisata di daerahnya masing-masing. (Gamal, 1997).

Mengembangkan pariwisata harus dilakukan melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu serta bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, ergonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam, dan tidak merusak lingkungan. Sesuai dengan kebijakan nasional, maka Program Pembangunan Kebudayaan Nasional meliputi bidang Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata yang masing-masing memiliki tujuan spesifik. Strategi dan program pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur.
2. Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
3. Peningkatan daya saing pariwisata.
4. Melengkapi sarana dan prasarana daerah tujuan wisata.
5. Menciptakan objek wisata yang potensial.
6. Mengeksplorasi semua sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata.
7. Menciptakan suasana yang aman, nyaman dan kondusif bagi wisatawan. (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025).

Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025,

disebutkan bahwa dalam pembangunan pariwisata daerah, maka pemerintah daerah sebaiknya terlebih dahulu membuat peraturan daerah tentang kepariwisataan sebelum merencanakan dan menyusun kebijakan, rencana dan program serta strategi untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan.

## **2. Kebijakan Pembangunan Wisata Pacu Jalur**

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memberikan wewenang kepada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dimana Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, yang merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Visi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi adalah ***“Kabupaten Kuantan Singingi Negeri yang berbudaya, Tujuan Wisata serta Pemuda dan Olahraga yang Handal dan Berprestasi”***. Kemudian, Misi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sumberdaya manusia dibidang kepariwisataan pemuda dan olahraga yang mengelola potensi budaya, kesenian pemuda dan olahraga yang dapat menjadi obyek dan tujuan wisata domestik maupun manca Negara.
- b. Menggali, membangun, mengembangkan dan melestarikan potensi

kepariwisataan Kabupaten Kuantan Singingi secara terencana dan berkesinambungan.

- c. Mempromosikan secara luas tentang kepariwisataan kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi ditingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. (DisbudparporaKuantan, 2018).

Salah satu kelemahan utama dalam perencanaan pembangunan pariwisata di Indonesia adalah perencanaan tidak berorientasi ke arah permintaan pasar (Demand Oriented). Pendekatan umum yang biasa dipakai dalam perencanaan pemasaran adalah terciptanya **"Matching"** atau **"Adjustment"** yang terus menerus antara sisi **"Supply"** dan **"Demand"**. Manifestasi dari pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut akan tampak pada rentangan kuantitas, kualitas maupun harga yang sesuai. Perubahan yang mungkin terjadi di suatu sisi (*Demand and Supply*) akan membawa perubahan pada sisi lain beserta komponennya.

Menurut William J. Stanton, 1981, dalam Konsep pemasaran secara sederhana menyatakan *"A Philosophy of business that states that the customers want satisfaction is the economic and social justification for a firm existence. Consequently, all company activities must be devoted, while still making a profit over long the run"*.

Mengacu kepada konsep pemasaran tersebut dapat dilihat bahwa pemasaran merupakan suatu kegiatan yang kompleks dan terpadu dalam memproduksi sesuatu barang atau jasa agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen, sehingga memperoleh keuntungan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan adalah memberlakukan pemasaran sebagai suatu sistem dari beragam unsur-unsur kepariwisataan yang

saling berinteraksi dan tergantung satu sama lain. Sebagai suatu pendekatan sistem, maka aktifitas pemasaran meliputi jaringan unsur-unsur sebagai berikut (William J Stanton, 1981) :

- a. *Organization doing the marketing job.* (Pengorganisasian pekerjaan pemasaran)
- b. *Product, service, ideas, or person being marketing.* (Produk, pelayanan, ide-ide, atau individu yang melakukan pemasaran)
- c. *Target market.* (Target Pasar)
- d. *Intermediaries helping in the exchange (the flow) between the marketing organization and its market, these are retailers, wholesalers, transportation agencies, financial institutions and so on.* (Bantuan faktor-faktor penting diantara pengorganisasian pemasaran dan target pasarnya, adalah para pedagang retail, pengusaha wisata, agensi transportasi, lembaga keuangan dan seterusnya).
- e. *Fundamental constraints, demographic factors, economic conditions, social and cultural forces, political and legal force, technology and competitive.* (Faktor-faktor mendasar lainnya, antara lain faktor-faktor demografi, kondisi-kondisi ekonomi, kekuatan-kekuatan social budaya, kekuatan politik dan hukum, teknologi dan persaingan).

Terdapat beberapa model analisis kebijakan yang dikembangkan oleh beberapa ahli kebijakan, antara lain model sistem, model rasional komprehensif, model penambahan atau inkremental, dan model kualitatif optimal (Winarno, 2012: 97) dengan penjelasan sebagai berikut : Garis pedoman kebijakan secara formal bertujuan untuk mencapai apa yang menjadi

kepentingan publik dan sarana yang dimungkinkan untuk merealisasikannya. Dalam hal ini, fisibilitas ekonomi dan politik merupakan landasan utama dari pembuatan suatu kebijakan. Fisibilitas politik berada dibawah kuasa dari sebuah sistem politik atau sistem pemerintah yang sangat besar perannya dalam pembuatan kebijakan. Sedangkan orientasi ekonomi yang pasti akan ada di setiap pembuatan kebijakan menjadi bahan pertimbangan pembuatan kebijakan tersebut.

Menurut Kusnardi dan Saragih (2008 :122) Pemerintah adalah alat bagi negara dalam menyelenggarakan segala upaya untuk kepentingan rakyatnya dan merupakan alat juga, dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Pemerintah adalah pelayan publik yang memiliki sejumlah kewenangan dan kekuasaan serta tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pemberian pelayanan publik tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pelayanan publik yang meliputi transparasi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban.

## **METODE**

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan alasan antara lain bahwa untuk melakukan penelitian yang berusaha mengungkap fakta mengapa penerimaan PAD dari sektor pariwisata Pacu Jalur yang setiap tahunnya diselenggarakan dan dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuansing secara internasional, ternyata jumlah penerimaan devisa daerah relatif kecil bahkan selalu menurun dari tahun ke tahun. Untuk menunjang suksesnya acara Pacu Jalur sebagai daya tarik khas wisata daerah Kuantan Singingi, maka pemerintah melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) telah

mengambil suatu kebijakan pembangunan pariwisata pengembangan Pacu Jalur dengan berbagai program yang dirancang. Namun, harapan banyak pihak selalu target PAD dari sektor ini sulit tercapai. Oleh karena itu, hanya tokoh-tokoh penting saja sebagai informan dan informan kunci yang mengetahui dan memahami rahasia kegiatan Pacu Jalur ini yang hanya dapat diteliti dan diungkap melalui penelitian kualitatif.

Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer antara lain meliputi, kebijakan dan program pembangunan kepariwisataan yang mendukung terhadap even wisata Pacu Jalur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing melalui Disbudpora yang bekerjasama dengan pemangku kepentingan sektor pariwisata, antara lain pelaku usaha wisata, kelompok sadar wisata dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Pacu Jalur, jumlah alokasi anggaran dana untuk kegiatan Pacu Jalur dari beragam sumber, program-program penunjang pariwisata Pacu Jalur, kebijakan dan pengaturan tentang retribusi dan perizinan objek wisata, sarana dan prasarana wisata dan lain-lain. Data sekunder sebagai data tangan kedua berupa bahan-bahan laporan, buku, naskah, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Even Pacu Jalur yang diperoleh dari informan, pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif ini antara lain sebagai berikut: Teknik penyusunan *Pedoman Wawancara* yang akan ditujukan kepada informan dan informan kunci (key-informan) terkait dengan masalah penelitian. Kemudian menggunakan *teknik Observasi*, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung dan tidak langsung terhadap objek penelitian antara lain, lokasi even wisata Pacu Jalur, sarana

dan prasarana wisatawan dan para tamu undangan, kegiatan sosial, ekonomi dan budaya yang dilakukan oleh masyarakat, kelompok sadar wisata dan berbagai pihak dari pelaku usaha wisata yang ikut berpartisipasi mendukung kelancaran pelaksanaan even wisata Pacu Jalur dengan berbagai kegiatan, seperti jasa dan perdagangan, transportasi, akomodasi, rumah makan dan restoran dan lain-lainnya. Sebagai teknik pengumpulan data untuk melengkapi data penelitian dilakukan teknik *Dokumentasi* terhadap berbagai even, kegiatan, peristiwa, kasus, kejadian, dan sebagainya.

## HASIL

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, maka diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat salah satunya berupa retribusi daerah. Untuk itu, dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diharapkan akan memberikan penguatan bagi daerah untuk melakukan pembebanan retribusi, sehingga retribusi akan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan ini, maka pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memandang penting memenuhi amanat undang-undang dimaksud dengan melakukan pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Peraturan Daerah ini diharapkan akan dapat memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, serta memotivasi

peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Dengan telah diaturnya besarnya Tarif Retribusi untuk setiap jenis jasa pelayanan dan fasilitas Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga di Kabupaten Kuantan Singingi melalui Peraturan Daerah (PERDA) yang telah berjalan selama 10 tahun sampai sekarang, maka diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pembangunan pariwisata akan dapat meningkat untuk membiaya pembangunan secara berkelanjutan. Namun pada kenyataannya, target PAD Kabupaten Kuansing termasuk penerimaan dari sektor pariwisata Pacu Jalur terus menerus mengalami penurunan atau tidak mencapai target.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi optimis agar pembangunan sektor pariwisata menyeluruh, terpadu dan terintegrasi dengan sektor-sektor pembangunan lainnya ke depan. Namun mengamati realisasi pelaksanaan pembangunan dengan anggaran biaya yang jauh lebih kecil dibanding belanja pegawai, kurangnya upaya untuk memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai potensi fisik dan non fisik yang dimiliki oleh daerah dan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, dan belum memadainya regulasi bidang kepariwisataan yang ditetapkan guna mendukung tercapainya maksud untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik, maka dapat disimpulkan adanya pendapat yang dapat dibenarkan bahwa selama ini even Pacu Jalur yang telah berusia ratusan tahun dipestakan belum mampu untuk mendongkrak PAD Kabupaten Kuantan Singingi karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pariwisata.

Selain itu, juga perlu dibenarkan bahwa kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten

Kuansing di bidang kepariwisataan masih terbatas atau belum cukup untuk mengantisipasi perkembangan dunia kepariwisataan yang sangat dinamis. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perencanaan dan pemasaran pariwisata Pacu Jalur khususnya secara terprogram dan terarah kepada target pasar wisatawan yang telah dituangkan dan dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) yang belum tuntas sampai saat ini dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Sebelum pembangunan objek pariwisata dimulai, baik fisik dan sarana prasarana penunjang dimulai, maka perlu disusun terlebih dahulu Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terukur dan terarah sesuai dengan potensi, objek dan daya tarik wisata yang dimiliki.

#### **Upaya-Upaya Meningkatkan PAD Sektor Pariwisata Pacu Jalur**

Berdasarkan Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Riau yang dilakukan pada tahun 2012, maka Pengembangan Pariwisata Provinsi Riau dilakukan melalui program (1) Pengembangan Daya Tarik Wisata, (2) Pengembangan Aksesibilitas Pariwisata, (3) Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata, (4) Pemberdayaan Masyarakat, (5) Peningkatan Investasi di Bidang Pariwisata, (6) Peningkatan Pemasaran Pariwisata, dan (7) Pengembangan Industri Pariwisata. (Renja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Riau, 2016).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan undang-undang maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan berbagai upaya dalam pembangunan kepariwisataan festival Pacu

Jalur guna menciptakan wisata budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menciptakan peluang kerja. Kegiatan program pembangunan kepariwisataan tersebut meliputi bidang-bidang pokok yaitu bidang Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi telah menyusun program sebagai upaya guna meningkatkan PAD dari even Pacu Jalur, antara lain sebagai berikut :

1. Pengumpulan dan penyusunan program pembinaan di bidang usaha dan jasa pariwisata
2. Pelaksanaan pengembangan usaha dan jasa pariwisata
3. Pelaksanaan upaya pembinaan di bidang usaha dan jasa pariwisata
4. Pelaksanaan pemantauan terhadap pengembangan usaha dan jasa pariwisata
5. Penyiapan bahan penyusunan laporan di bidang usaha dan jasa pariwisata
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap usaha dan jasa pariwisata
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Rancangan Program Pembangunan Kepariwisata yang diintrodusir Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, data dan informasinya memang tidak diperoleh secara sekunder, namun upaya-upaya yang dilakukan berbagai pihak terhadap objek wisata Pacu Jalur dapat diamati secara langsung di lapangan. Berikut dapat dilihat data upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata Pacu Jalur sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Tentang Upaya-Upaya Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dari Sektor Pariwisata Pacu Jalurdi Kabupaten Kuantan Singingitahun 2014-2018**

| No | Upaya-Upaya Pemerintah Kabupaten  | Jenis Kegiatan                                                                                                                            | Realisasi                  | Dampak                                      |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | Alokasi Dana dan Donasi           | - APBD Kuansing<br>- Hibah Provinsi Riau<br>- Sumbangan Perusahaan<br>- Sumbangan Masyarakat<br>- Kontribusi Sewa Lapak                   | - 100%<br>- Minus          | Target PAD dari Pacu Jalur tdk tercapai     |
| 2  | Promosi dan Pemasaran             | - Studi Banding Bupati<br>- Ekspose Bupati<br>- Audiensi Disparpora<br>- Diskusi Publik<br>- Acara Coffe Morning<br>- Kunjungan ke daerah | - 100%                     | Pacu Jalur keluar dari Evan Wisata Nasional |
| 3  | Kerjasama                         | - Kerjasama Dinas Terkait<br>- MoU antar Kepala Daerah dan Instansi Vertikal                                                              | Sedang Berjalan            | Belum Terlihat                              |
| 4  | Pembangunan Infrastruktur         | - Aksesibilitas wilayah<br>- Sarana dan prasarana<br>- Ruang Terbuka Hijau                                                                | Keterbatasan Anggaran Dana | PAD tidak mencapai target                   |
| 5  | Integrasi Program                 | - Bersifat Dadakan dan Tidak Terprogram                                                                                                   | Sedang Berjalan            | Belum Diketahui                             |
| 6  | Intensifikasi Pajak dan Retribusi | - Bersifat Instant dan Tidak Terprogram                                                                                                   | Sedang Berjalan            | Belum Diketahui                             |
| 7  | Pengembangan Home Stay            | - Bersifat Sporadis dan Tidak terprogram                                                                                                  | Sedang Berjalan            | Belum Diketahui                             |
| 8  | Program Desa Taat Pajak           | - Bersifat Sopradis                                                                                                                       | Sedang Berjalan            | PAD tak mencapai target                     |
| 9  | Pelatihan Sapta Pesona Wisata     | - Pokdarwis se-Riau                                                                                                                       | 100%                       | Juara I                                     |
| 10 | Atraksi Wisata                    | - Kegiatan Seni-Budaya                                                                                                                    | 100%                       | Belum berkembang                            |
| 11 | Insentif Hadiah Lomba             | - Kolektif                                                                                                                                | 100%                       | Semakin Menurun                             |

Sumber : Data Penelitian, 2019.

Mengacu kepada data tabel Tentang Upaya-Upaya Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dari Sektor Pariwisata Pacu Jalurdi Kabupaten Kuantan Singingitahun 2014-2018 , tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Satuan Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata Pacu Jalur, ternyata dari sebanyak sebelas (11) upaya program yang dilaksanakan dengan beberapa rincian jenis kegiatan hanya 1 (satu) upaya saja yang

memiliki dampak positif yakni kolom berwarna biru yaitu memperoleh Juara I dalam Program Pembinaan dan Pelatihan Sapta Pesona Wisata se-Provinsi Riau yang diikuti oleh Kelompok Sadar Wisata Desa Kasang Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2017 yang lalu. Sementara itu, hampir dapat dikatakan bahwa sisanya sebanyak 10 (sepuluh) upaya program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kuansing hanya segelintir yang berjalan 100%, sebagian lagi masih berlangsung serta keterbatasan dana, sehingga dampak atau hasil yang diperoleh sebagian besar belum

diketahui dan tidak mencapai target PAD yang telah ditetapkan, bahkan Pariwisata Pacu Jalur tidak masuk dalam kalender Even Wisata Nasional.

## PEMBAHASAN

Mempelajari data dan informasi yang disampaikan informan penelitian sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata Pacu Jalur, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Faktor belum adanya pengaturan berupa Peraturan Daerah (PERDA) untuk menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Undang-Undang Kepariwisata Nasional, selain PERDA tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Usaha Kepariwisata. Ketiadaan pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan pariwisata ini, telah menyebabkan Disparpora Kabupaten Kuansing terkesan kurang inisiatif, kaku, sporadis dan tambal-sulam dalam melaksanakan pembangunan pariwisata dan pengembangan even wisata Pacu Jalur secara terprogram, yang pada gilirannya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencapai target yang ditetapkan.
2. Faktor Keterbatasan Anggaran Dana pembangunan yang dialokasikan untuk bidang pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Kuansing pada umumnya dan khususnya pengembangan even Pariwisata Pacu Jalur, sehingga upaya untuk menggali dan

mengembangkan potensi dan objek wisata lainnya sebagai sulit dilakukan.

Pembiayaan penyelenggaraan even Pariwisata Pacu Jalur masih tergantung subsidi dana dari APBD Pemerintah Kabupaten dan kontribusi atau hibah dari unsure pemerintah Provinsi Riau, para pemangku kepentingan dan sumbangan masyarakat. Pesta Pacu Jalur yang diadakan setiap tahun menelan biaya yang cukup besar, namun pemasukan dana yang diperoleh dari ajang lomba dan penghasilan objek dan daya tarik wisata lainnya ternyata juga tidak mampu mendongkrak PAD Kabupaten Kuansing dalam 1 dekade terakhir.

3. Faktor ketiga, adalah masih kuatnya ketergantungan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan program dan upaya-upaya pembangunan lainnya di bidang kepariwisataan terhadap upaya atau langkah-langkah yang dilakukan Bupati sebagai pimpinan tertinggi di daerah. Akhirnya, pengembangan even Pariwisata Pacu Jalur yang telah berusia ratusan tahun selalu kekurangan dana dan tidak mampu ditopang oleh kontribusi sub sektor pariwisata lainnya, maupun dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana wisata yang diperlukan.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahsan dan analisis data yang telah dilakukan dalam peelitian ini, maka dapatlah dirumuskan beberapa kesimpulan penelitian untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan sebagai berikut :

- a. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi dalam Tahun Anggaran 2014-2018 (selama 5 tahun) yang diperoleh dari sektor pajak dan retribusi serta perizinan, ternyata selalu tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Begitu pula dengan kontribusi dari penyelenggaraan pesta tahunan Even Wisata Pacu Jalur terhadap penerimaan PAD bidang kepariwisataan
- b. Upaya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata Pacu Jalur yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi antara lain, adalah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuansing Tentang Pajak Reklame dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Peraturan Daerah Tentang Usaha Pariwisata sebagai kebijakan regulasi dalam pembangunan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Kuansing. Untuk menindaklanjuti kedua aturan hukum tersebut, maka upaya konkrit lainnya yang dilakukan antara lain adalah mengalokasikan dana APBD Kabupaten Kuansing dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahun dan termasuk dana penyelenggaraan pesta Pacu Jalur di dalamnya berikut hadiah yang ditawarkan dalam kawasan wisata yang dikemas dengan berbagai atraksi wisata. Kemudian, melakukan kegiatan promosi dan pemasaran kalender wisata Pacu Jalur, melakukan kerjasama dengan dinas terkait dan instansi vertikal di daerah dan pemerintah pusat. Melaksanakan pembangunan infrastruktur sarana

dan prasarana wisata pendukung even Pacu Jalur, mulai mengintegrasikan even wisata Pacu Jalur dengan objek dan daya tarik wisata potensial lainnya di daerah, membuat komitmen melakukan intensifikasi pungutan pajak dan retribusi, mengembangkan Home-Stay bagi wisatawan, memperkenalkan program Desa Taat Pajak, Pelatihan Kelompok Sadar Wisata agar mampu mewujudkan program Sapta Pesona Wisata.

- c. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab dilakukannya upaya-upaya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuantan Singingi melalui sektor wisata Pacu, antara lain yaitu : *Pertama*, faktor belum adanya kebijakan Hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA yang menjadi acuan pembangunan objek dan daya tarik wisata daerah secara terencana, terprogram dan terukur dalam jangka panjang. *Kedua* adalah faktor keterbatasan anggaran dana pembangunan (APBD) Pemerintah Kabupaten Kuansing yang dialokasikan untuk pengembangan kepariwisataan daerah terutama even wisata Pacu Jalur. *Ketiga*, faktor ketergantungan jajaran Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Kuansing terhadap inisiatif dan upaya Bupati Kuansing dalam menggali sumber-sumber dana, kegiatan promosi dan pemasaran even wisata Pacu Jalur kepada pihak luar, sehingga potensi dan sumberdaya lokal belum mampu dioptimalkan menghasilkan devisa bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing dan Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi, Drs, MPd dan Suwandi, Drs, MSi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Penerbit, Rineka Cipta, Jakarta.
- Burhan, Bungin, 2011. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Kedua, Penerbit, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta.
- Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, 2018. Taluk Kuantan.
- Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, 2018. Dispenda, Taluk Kuantan.
- Gamal Suwanto, 1997. *Dasar-dasar Pariwisata*, Penerbit, Andi Offset, Yogyakarta.
- Halim dan Mujib, 2009. *Problematika dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah*, Penerbit, Sekolah Pasca Sasjana UGM, Yogyakarta
- J. Kaloh, 2002. *Bentuk Otonomi Daerah*, Penerbit, PT. Rineka Cipta, Jakarta. halaman . 3.
- Josef Riwo Kaho, 2005. *Prospektif Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Penerbit, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm . 67.
- Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka, 2018. *Biro Pusat Statistik*, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Teluk Kuantan.
- Moeleong, Lexy, J., 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit, Rosda Karya, Bandung.
- Mohammad Kusnardi dan Bintan R. Saragih. 2008. *Ilmu Negara*. Penerbit, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Naisbit, Jhon, 1994. *Kejutan Masa Depan*, Diterbitkan oleh PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Pariwisata Abad 21, 2001. *Beberapa Pemikiran Tentang Ramalan Masa Depan Pembangunan Pariwisata Indonesia*, Penerbit, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rencana Kerja (Renja), 2017. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Provinsi Riau, Pekanbaru.
- Wahab, 2000. *Manajemen Kepariwisata*, Penerbit, PT Pradnya Paramita, Jakarta, Indonesia.
- William J Stanton , 1981. *A Company's complete marketing system. A Framework of internal resources operating within a set of external forces*. William J Stanton, Fundamentals of Marketing, Grolier Business Library, By Mc Grow-Hill, Inc. USA).
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Nomor Tentang Pajak Reklame dan Retribusi Tempat Hiburan, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Teluk Kuantan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Nomor 18 Tahun 2012, Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Teluk Kuantan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Nomor 8 Tahun 2009, Tentang Usaha KePariwisata, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Teluk Kuantan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, 2009. Diterbitkan oleh PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional

2005-2025, Penerbit, Rineka  
Cipta, Jakarta.  
Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000,  
Tentang *Program Pembangunan  
Nasional* (PROPENAS), Penerbit,  
CV. Tamita Utama, Jakarta.  
Datariau.com, Selasa, 17/1/2017.